

IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI INDONESIA

TICHA NURDA FITRI¹, M. FACHRI ADNAN², SYAMSIR³
Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang, Indonesia^{1,2,3}
tichanurdafitri@gmail.com

Abstract: *Collaborative Governance is a process that involves various stakeholders (parties) who are bound to carry the interests of each agency in achieving common goals. This study aims to find out how the development of collaborative governance in Indonesia is seen from the theoretical and practical settings and how the solutions are solved. With the systematic approach to Literature Review in journals that have been published from 2011 to 2021, the results show that HR research currently focuses on two topics and trends: limited capabilities and resources. The method that is often used in collaborative governance research in Indonesia is a qualitative approach of 80%, a quantitative approach of 15% and a mix method approach of 5%. The cause of the problems in improving the implementation of collaborative governance in Indonesia, governance demands the implementation of the rules of public information disclosure. Justice, transparency, participation, and accountability are prerequisites for the creation of good governance and free from corruption, collusion and nepotism. The solution given to answer the problem of the low implementation of collaborative governance in Indonesia is the process of building trust between stakeholders is the starting point for Collaborative Governance where the process is not only about negotiation but also about building trust among stakeholders and must be equitable that focuses on network members embedded a sense of mutuality. trust each other and the actors have done Trust Building/Building Trust from Collaborative Governance.*

Keywords: *Systematics Literature Review collaborative governance.*

Abstrak: *Collaborative Governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholders (pihak) yang terikat untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan collaborative governance di Indonesia yang dilihat dari tatanan teoritis maupun praktis dan bagaimana solusi pemecahannya. Dengan pola pendekatan Sistematis Literatur Review pada jurnal yang sudah dipublikasikan sejak tahun 2011 sampai tahun 2021 maka didapat hasil bahwa penelitian SDM saat ini berfokus pada dua topik dan tren: keterbatasan kemampuan dan sumber daya. Metode yang sering digunakan dalam penelitian collaborative governance di Indonesia adalah dengan pendekatan kualitatif sebesar 80%, pendekatan kuantitatif sebesar 15% dan pendekatan mix method sebesar 5%. Penyebab terjadinya permasalahan dalam peningkatan Implementasi collaborative governance di Indonesia tata kelola tuntutan pelaksanaan aturan keterbukaan informasi publik. Keadilan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan prasyarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Solusi yang diberikan untuk menjawab permasalahan rendahnya Implementasi collaborative governance di Indonesia adalah Proses membangun kepercayaan antar stakeholder merupakan titik awal untuk Collaborative Governance yang dimana prosesnya bukan hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan dan haruslah merata yang berfokus pada anggota jejaring tertanam rasa saling percaya satu sama lain dan para pelaku sudah melakukan Trust Building/Membangun Kepercayaan dari Collaborative Governance.*

Kata Kunci: *Systematic Literature Review, collaborative governance.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi akan hak dan kewajiban warga Negara, maka dengan mestinya Negara untuk menjamin akan kesejahteraan masyarakatnya secara utuh sesuai dengan amanat UUD 1945. Terutama pada pembukaan UUD Dasar 1945 alinea pertama, pada pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan kemanusiaan. Ansel dan Gash (2007) mendefinisikan

Collaborative Governance sebagai pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. definisi ini menekankan enam kriteria penting, yaitu forum diprakarsai oleh lembaga atau lembaga publik, peserta dalam forum termasuk aktor non-negara, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya "diajak berkonsultasi" oleh badan-badan publik, forum tersebut diatur secara formal dan bertemu secara kolektif, forum tersebut bertujuan untuk membuat keputusan melalui konsensus, serta fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik.

Untuk mengatasi tantangan pengadaan infrastruktur termasuk masalah hukum, sosial, politik, dan keuangan, pemerintah dari beberapa negara telah mulai mengundang pihak swasta untuk bergabung dengan perjanjian kontrak jangka panjang berdasarkan *Public Private Partner ship* (PPP) (Grimsey dan Lewis, 2002). PPP memungkinkan pemerintah untuk mengambil manfaat dari partisipasi sektor swasta dalam mengelola dan membiayai ekspansi layanan publik dengan mengalihkan risiko ke entitas swasta. Akibatnya, pemerintah dapat fokus pada pembuatan kebijakan, perencanaan, dan regulasi (Bank Dunia, 2011).

Collaborative Governance dan *Public Private Partner ship* terkadang dapat merujuk pada fenomena yang sama. *Public Private Partner ship* biasanya membutuhkan kolaborasi untuk berfungsi, tetapi tujuannya sering kali adalah mencapai koordinasi dari pada mencapai konsensus pengambilan keputusan semata. *Public Private Partner ship* dapat dengan mudah mewakili kesepakatan antara aktor publik dan swasta untuk memberikan layanan tertentu atau melakukan tugas-tugas tertentu. Pengambilan keputusan kolektif karena itu sekunder dari definisi *Public Private Partner ship*. Sebaliknya, pelembagaan proses pengambilan keputusan kolektif merupakan pusat definisi *Collaborative Governance*.

Collaborative governance (Jung et al., 2009) adalah sebagai proses pembentukan, mengemudikan, memfasilitasi, mengoperasionalkan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu organisasi atau publik sendiri. Dalam konteks ini, *Collaborative Governance* merupakan suatu model, dimana dalam membangun suatu daerah, pemerintah tidak dapat dengan mandiri mengelola daerahnya, sehingga peran dan fungsi pemerintah tidak lagi menjadi dominan, dibutuhkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan maupun mengakomodir kebutuhan publik.

Permasalahannya yaitu pemerintah yang belum terbuka tentang informasi masalah keuangan pemerintah, aksesibilitas dokumen untuk mendapatkan informasi publik pun sangat sulit bahkan di tiadakan, masalah pembangunan di Indonesia *collaborative governance* ini diperlukan adanya sinergi kerja yang berbasis pada komitmen bersama untuk menyelaraskan pemahaman terhadap suatu permasalahan publik dengan pelibatan berbagai kepentingan yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan media yang disebut dengan *pentahelix collaboration*. "Strategi ini dirasakan lebih efektif dalam menghadapi tantangan birokrasi ke depannya," dalam mewujudkan *Collaborative Governance* ini antara lain kepemimpinan, ketergantungan satu dengan yang lain, insentif yang jelas, proses pembuatan kebijakan, sumber daya yang dimiliki serta sistem kolaborasi program pembangunan, dan terakhir ialah dampak yang dihasilkan.

Maka dari sini kita harus mendorong reformasi birokrasi ke depannya harus didasarkan pada capaian dampak yang jelas terhadap proses pembangunan itu sendiri (*impact based reform*) "Lebih jauh ia menjelaskan, terkait *collaborative governance* maka perlu membangun manajemen kinerja lintas kementerian dan lembaga melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) ini lebih tinggi dari SAKIP, melalui SAKP ini setiap kementerian dan lembaga juga pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam pencapaian prioritas program pembangunan nasional. Ia mencontohkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dalam proses perencanaan pembangunan dalam hal ini Bappenas dapat membagi *outcome* dan *impact* di antara lembaga-lembaga yang terlibat, sehingga permasalahan kemiskinan dari pusat dan daerah dapat diatasi.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan sistematis untuk meninjau literatur tentang *collaborative governance*, Sistematis Literatur Review (SLR). Sistematis Literatur Review bertujuan untuk proses mendapati, menilai, dan menafsirkan semua bentuk temuan yang ada dengan tujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan studi tertentu (Kitchenham & Charters, 2007). Tinjauan pustaka ini telah dilakukan sebagai Systematic Literature Review berdasarkan pedoman asli yang diusulkan oleh Kitchenham & Charters (2007). Metode ulasan, gaya, dan beberapa tokoh dalam bagian ini juga dimotivasi oleh (Unterkmsteiner et al., 2011) dan (Radjenović et al., 2013). Seperti di tunjukkan dalam Gambar 1, SLR dilakukan dalam tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tinjauan literatur. Pada langkah pertama persyaratan untuk *review* sistematis diidentifikasi (Langkah 1). Tujuan melakukan tinjauan pustaka dibahas dalam pendahuluan bab ini. Kemudian, tinjauan sistematis yang ada pada *collaborative governance*, diidentifikasi dan ditinjau. Protokol tinjauan dirancang untuk mengarahkan pelaksanaan tinjauan dan mengurangi kemungkinan bisa peneliti (Langkah 2). Ini mendefinisikan pertanyaan penelitian, strategi pencarian, proses pemilihan studi dengan kriteria inklusi dan eksklusi, penilaian kualitas, dan akhirnya ekstraksi data dan proses sintesis. Protokol tinjauan disajikan, dikembangkan, dievaluasi dan ditingkatkan secara berulang selama tahap pelaksanaan dan pelaporan tinjauan.

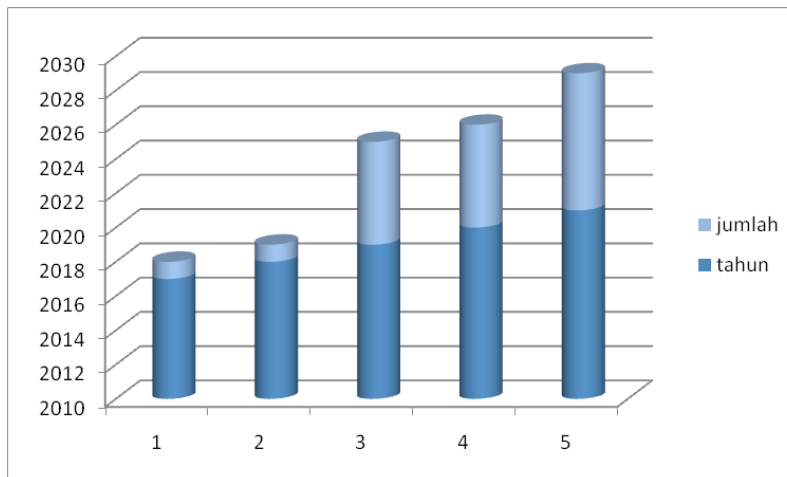


Gambar 1. Langkah-langkah Sistematis Literatur Review

C. Hasil dan Pembahasan

Publikasi Jurnal yang Signifikan

Dalam ulasan *Systematic Literature Review* (SLR) ini, ada 22 jurnal yang menganalisis kinerja peningkatan *collaborative governance* di Indonesia. Setiap tahun terdapat jurnal yang membahas mengenai peningkatan *collaborative governance* di Indonesia, bahkan terbanyak pada tahun 2017 dan 2021 beberapa jurnal dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif membahas mengenai peningkatan *collaborative governance* di Indonesia. Gambar 4 juga menunjukkan bahwa bidang penelitian tentang peningkatan *collaborative governance* di Indonesia masih sangat relevan hingga saat ini.



Gambar 2. Distribusi Studi Dipilih selama 10 Tahun

2. Daftar jurnal review

No	Nama jurnal	akredita si	Penerbit	Tahun terbit
1	Jejaring <i>collaborative governance</i> pada program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam pencegahan HIV/AIDS di kabupaten subang	tersinta	Kusnadi, I H	2019
2	Penerapan <i>collaborative governance</i> pada promosi produk UMKM Tenun balai panjang di kota Payakumbuh	tersinta	Dyo, Berlian zella	2017
3	fintech dan <i>collaborative governance</i> dalam pertanian di banten fintech and <i>collaborative governance</i> at farming in banten	tersinta	Ramadhan, Gilang	2020
4	Collaborative Governance in Corporate Social Responsibility Forum in Banyumas Regency	tersinta	Furqoni, Iqtikaful; Rosyadi, Slamet	2019
5	Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance	tersinta	Wijayanti, Aris; Kasim, Azhar	2021
6	Collaborative Governance in the Management of Village Owned Enterprises Ponggok Sub District Polanharjo District Klaten Central Java 2016 Kohen	tersinta	Sofi, Kohen; Mutiarin, Dyah Nisa, Khirun; Zega, Yuliar Magdalena	2018
7	implementasi pemerintahan kolaboratif dalam penguatan nilai-nilai bela Negara	tersinta		2020
8	Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang	tersinta	Kariem, M Q; Afrijal, A	2021
9	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjung pinang	tersinta	Sepriandi, Sigit; Hussein, Rahmawati	2019
10	dinamika <i>collaborative governance</i> dalam studi kebijakan public	tersinta	Elektronik, Heka	2019
11	Politik Pengelolaan Sampah (Studi tentang	tersinta	Ginanjari, Arif	2020

	Implementasi Kemitraan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru)			
	Zulfa			
	Collaborative Governance dalam tersinta			
	Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung			
12	Collaborative		Iyoega,Rofi, Ramadhona	2020
		tersinta	Kirana, cintatya Adhita Dara; Artisa, Rike Anggun	2020
13	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu			
	collaborative governance dalam tersinta			
	pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm) pada dinas sosial kabupaten bandung			
14			Goldman, Ian. And pabari, mine	2021
	Collaborative Governance In National Community Empowerment Programs In Poverty Alleviat	tersinta	Khasanah, rahma putrid; purnomo, eko priyo; kasiwi	2021
15	Analisis Collaborative Governance Dalam Penerapan Elektronik Kesehatan (E-Kes)	tersinta	Triyanto, deni; effendi,soehito;	
16	Di Kabupaten Bengkulu Tengah		puspita ,veny	2021
	collaborative governance dalam tersinta			
	pengelolaan wisata berkelanjutan di kabupaten kulon progo (studi kasus: wisata kebun teh nglinggo)		Surya , I., sanny N ., herdin A.S, & niken N	2021
17	integration of development programs based on collaborative governance on	tersinta	Autoridat	
18	regional policies and village	tersinta	Nacional del servicio civil	2021
			Dewi, siti Malaiha rahayu, rahayu; kismartini, kismarti	2019
19	Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati	tersinta	Hidayatullah, Muhammad ammar;huta	2019
20	collaborative governance in gender mainstreaming policy in yogyakarta city	tersinta	Islami, Muhammad fahmi; hadi, krishno	2021
21	Implementasi Pengembangan Wisata Kampung Keramat di Kota Malang			
	collaborative governance dalam kebijakan tersinta			
	pembangunan pariwisata di kabupaten gianyar			
22			Yasintha, P N	2020

3. Daftar jurnal yang akan di analisis

No	Nama jurnal
1	Jejaring collaborative governance pada program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam pencegahan HIV/AIDS di kabupaten subang
2	Penerapan collaborative governance pada promosi produk UMKMTenun balai panjang di kota payakumbuh
3	fintech dan collaborative governance dalam pertanian di banten fintech and collaborative governance at farming in banten

- Collaborative Governance
4 in Corporate Social Responsibility Forum in Banyumas Regency
Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif
5 Collaborative Governance
Collaborative Governance in the Management of Village Owned Enterprises
6 Ponggok Sub District Polanharjo District Klaten Central Java 2016 Kohen
7 implementasi pemerintahan kolaboratif dalam penguatan nilai-nilai bela Negara
8 Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Penanganan
9 Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjung pinang
10 dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan public
Politik Pengelolaan Sampah (Studi tentang Implementasi Kemitraan Pengelolaan
Sampah di Kota Pekanbaru)
11 Zulfa
Collaborative Governance dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten
Bandung
12 Collaborative
13 Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu
collaborative governance dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm) pada
dinas sosial kabupaten bandung
14
Collaborative Governance In National Community Empowerment Programs In
15 Poverty Alleviat
Analisis Collaborative Governance Dalam Penerapan Elektronik Kesehatan (E-Kes)
16 Di Kabupaten Bengkulu Tengah
collaborative governance dalam pengelolaan wisata berkelanjutan di kabupaten
17 kulon progo (studi kasus: wisata kebun teh nglinggo)
integration of development programs based on collaborative governance on regional
18 policies and village
Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis
19 Gender di Kabupaten Pati
20 collaborative governance in gender mainstreaming policy in yogyakarta city
Implementasi Pengembangan Wisata Kampung Keramat di Kota Malang
21
collaborative governance dalam kebijakan pembangunan pariwisata di kabupaten
ganyar
22

D. Penutup

Untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara menciptakan solusi, *collaborative governance* ini diperlukan adanya sinergi kerja yang berbasis pada komitmen bersama untuk menyelaraskan pemahaman terhadap suatu permasalahan publik dengan pelibatan berbagai kepentingan yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan media yang disebut dengan *pentahelix collaboration*. Dalam mewujudkan *Collaborative Governance* ini antara lain kepemimpinan, ketergantungan satu dengan yang lain, insentif yang jelas, proses pembuatan kebijakan, sumber daya yang dimiliki serta sistem kolaborasi program pembangunan, dan terakhir ialah dampak yang dihasilkan. “Maka dari sini kita harus mendorong reformasi birokrasi ke depannya harus didasarkan pada capaian dampak yang jelas terhadap proses pembangunan itu sendiri (*impact based reform*)”. Terkait *collaborative governance* maka perlu membangun manajemen kinerja lintas kementerian dan lembaga melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) ini lebih tinggi dari SAKIP, melalui SAKP ini setiap kementerian dan lembaga juga pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam pencapaian prioritas program pembangunan nasional. Ia mencontohkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dalam

proses perencanaan pembangunan dalam hal ini Bappenas dapat membagi *outcome* dan *impact* diantara lembaga-lembaga yang terlibat, sehingga permasalahan kemiskinan dari pusat dan daerah dapat diatasi.

Daftar Pustaka

- Agranoff, R., & McGuire, M. 2003. Collaborative public management: New strategies for local governments. Georgetown University Press.
- Ansell, Chris & Alison Gash. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice". Journal of Public Administration Research and Theory. P. 543-571.
- Ansell, Chris dan Gash, Alison. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Georgetown University Press.
- Dwiyanto, A. 2011. Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. 2012. An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol.22, hal.1-29. Diakses tanggal 29 November 2013. dari Oxford Journals (JPART).
- Ervianti, M. 2018. faktor-faktor yang menghambat collaborative governance dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di kota pekanbaru. jom fisip, 5, 1-13. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/20434>
- governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Kurniasih, D. 2017. Collaborative Governance dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. Sosiohumaniora, 19(1), 1-7.
- Kusnadi, I. H. 2019. Jejaring Collaborative Governance Pada Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang. International Journal of Demos, 1(2), 204-231.
- Melinda, S., Maulana, D., & Habibi, F. 2020. Kolaborasi Pemerintah Kota Serang dan Ormas Islam dalam Memberantas Prostitusi di Alun-Alun Kota Serang. JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 1(1), 43-56.
- Practice.JPART. (Online), Volume 18 (<https://sites.duke.edu/>) diakses pada 20 Agustus 2018.
- Subarsono, A. 2016. Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer. Jember: Jember Publishing.
- Thomson, A. M., James L. P., & Theodore, K. M. 2007. Conceptualizing and measuring collaboration. Journal of Public Administration Research and Theory, 1(1), 23-56.
- Wanna, John. 2008. Collaborative Governance : A new era of public in Australia?. The Australian National University.
- Widiyanto, A., Hikmawan, M. D., & Riswanda, riswanda. 2019. JSPG: Journal of Social Politics and Governance Implementasi Rencana Aksi Nasional Bela Negara Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Oleh Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Journal of Social Politics and Governance, 1(2), 95-115
- Yasintha, P. N. 2020. Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(1), 1-23.
- Yunni Susanty dan Yuyu Yuningsih. 2021. Implementasi Electronic Government: Studi Kasus pada Aplikasi SILPa KAMI di Pemerintah Kota Cimahi. Jurnal Wacana Kinerja, 24 (2)